



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



LAPORAN AKHIR  
TAHUN 2015

<http://pptd.dephub.go.id>

# SELAMAT DATANG



## Maklumat Pelayanan Informasi Kementerian Perhubungan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

## Prioritas Program dan Kegiatan Pelayanan Informasi Tahun 2015



### Forum PPID

Terlaksananya kegiatan FPPID sebagai sarana koordinasi antar PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan



### Desk Pelayanan Informasi Representatif



### Daftar Infomasi Publik

Tersusunnya Daftar Informasi Publik sesuai Kategori Informasi (Berkala, Serta Merta, Setiap Saat dan Dikecualikan)

## PROGRAM 2015



Pelayanan Informasi di Kementerian Perhubungan dilakukan secara Desentralisasi, untuk lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian sehingga kegiatan Pelayanan Informasi oleh PPID Utama ini dipandang penting untuk dilaksanakan koordinasi dengan setiap unit/satuan kerja (PPID Pelaksana) dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

# MEKANISME PELAYANAN INFORMASI KEMENHUB

DALAM MELAYANI PERMINTAAN DAN KEBUTUHAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MELALUI DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELAKUKAN LAYANAN LANGSUNG DAN LAYANAN MELALUI MEDIA ANTARA LAIN MENGGUNAKAN TELEPON/FAX SERTA EMAIL

## MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui PPID Kementerian Perhubungan, melalui website, email, surat, fax, contact center Kemenhub 151 ataupun datang langsung.



## PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pemohon Informasi mengisi/melampirkan Formulir Permohonan dan memberikan salinan data diri (KTP/NPWP) untuk perorangan dan akte pendirian untuk Badan Hukum



Pemohon Informasi menerima bukti permohonan informasi apabila syarat telah dipenuhi



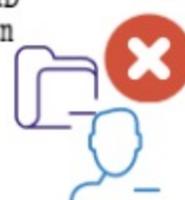
**MAKSIMAL 10 HARI KERJA**

(dapat dilakukan perpanjangan maksimal : 7 Hari Kerja)



Pemohon menerima Informasi Pemberitahuan Tertulis dari PPID Kementerian Perhubungan

Pemohon Informasi menerima Informasi Yang Diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi



# KEGIATAN TAHUN 2015



Dalam melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax serta email

Telp/Fax: 021 3504631  
Email : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)  
<http://ppid.dephub.go.id>

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik.

Dalam rangka percepatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Pembantu di Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPPID) 2015 di Surabaya pada tanggal 5-7 Mei 2015 dengan tema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana".



# 2015

.....  
*FPPID Surabaya*



# 10 REKOMENDASI FPPID 2015

Dalam Forum PPID diperoleh kesimpulan dengan 10 (sepuluh) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut :



## 1. Pengembangan dan Penyempurnaan Website

Mengajukan usulan penyempurnaan website. Perlu adanya penonjolan Informasi Publik pada halaman website, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dalam sistem satu kali klik saja

## 2. Ajukan Pengadaan Ruang Layanan Informasi Publik pada tempat yang strategis yang dapat menjadi etalase keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;

### 3. Mengisi Rubrik Yang Masih Kosong;

Segera mengisi beberapa Informasi Publik yang masih kosong, antara lain : Perjanjian dengan pihak ketiga tahun 2014, Catatan atas laporan keuangan Tahun 2014 dsb;

### 4. Informasi Publik Terbaru;

Melakukan pembahasan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti DIPA, LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, RENSTRA, Laporan SABMN dan Data Statistik, dll;

### 5. Melakukan Pengisian Informasi Pejabat Publik Secara Lengkap;

Memperbaharui Profil pejabat publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan dibuat form isian data diri singkat beserta foto. Informasi Pejabat Publik diperbaharui segera seiring dengan pelantikan perubahan pejabat (sementara ini hanya diisi dengan nama, alamat kantor, dan nomor kantor serta telepon kantor saja);

### 6. Permintaan Informasi Melalui Contact Center 151;

Eskalasi tiket terkait dengan permintaan informasi publik dari Contact Center 151 akan didokumentasikan, dikelola dan diselesaikan dengan mekanisme pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



### 7. Mendorong Pembentukan PPID Pelaksana UPT :

Kembali mengingatkan pada seluruh PPID pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membentuk PPID Pelaksana UPT. Dari 537 UPT, yang sudah memiliki penetapan PPID pelaksana UPT sebanyak 112 UPT. Selanjutnya bagi setiap PPID Pelaksana UPT yang sudah dibentuk agar diminta alamat email untuk dibuatkan milis sebagai media komunikasi antar para PPID;



### 8. Penghargaan PPID Pelaksana UPT terbaik :

Saat ini sedang disiapkan mekanisme penilaian untuk penghargaan PPID UPT terbaik yang paling rutin memberikan laporan pelayanan informasi publik secara berkala kepada Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama;

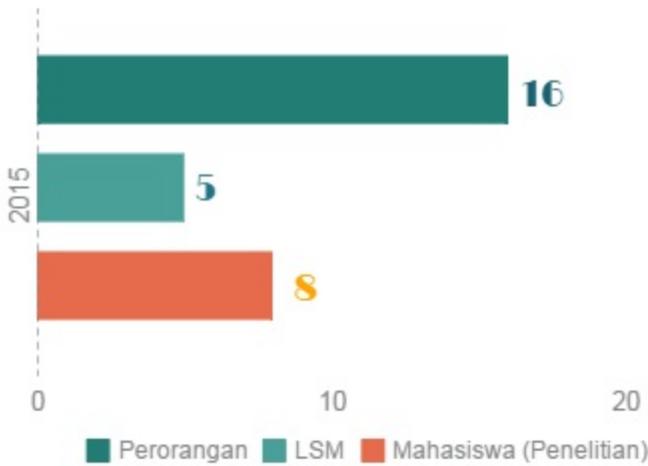
### 9. Memperbaharui KP 807 Tahun 2013;

Keputusan Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama Kementerian Perhubungan Nomor KP 807 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera diperbaharui sesuai dengan mekanisme penetapan klasifikasi informasi disertai hasil uji konsekuensi;

### 10. Rencana Anggaran;

Mengusulkan penyelenggaraan Forum PPID dengan penambahan materi dan waktu penyelenggaraan menjadi 3 hari dengan teknis pelaksanaan 2 hari meeting fullboard.

# RINCIAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI 2015



Jumlah Pemohon Informasi :

**29** Pemohon Informasi

Waktu Rata-rata Pelayanan : **± 3** Hari

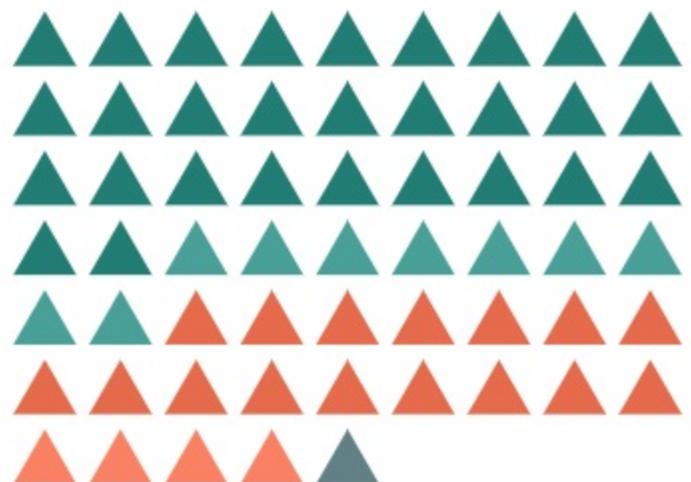
Selama Tahun 2015, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 29 (dua puluh sembilan) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 3 (tiga) hari kerja, dimana dari 29 (dua puluh sembilan) permohonan terdapat 1 (satu) keberatan dari Pemohon Informasi atas nama Elnard Peter. Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari 5 (lima) pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 8 (delapan) pemohon dari mahasiswa/peneliti dan 16 (enam belas) Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik, penelitian, dan sinkronisasi pembangunan di daerah.

Selanjutnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Kementerian Perhubungan berupaya secara optimal untuk menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui beberapa sarana antara lain:

1. Situs Kementerian Perhubungan ([http:// www.ppido.dephub.go.id/](http://www.ppido.dephub.go.id/));
2. Contact Center Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Contact Center 151; SMS Center 1151; email [ppido@dephub.go.id](mailto:ppido@dephub.go.id) dan Pelayanan secara langsung (Desk Informasi).

**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN :**

**59** PERMOHONAN



■ PPID Utama (49%) ■ PPID Darat (15%)  
 ■ PPID Laut (27%) ■ PPID Udara (7%) ■ PPID KA (2%)

# PENGHARGAAN KIP PPID UPT

Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan terus diupayakan salah satunya dengan cara memberikan penghargaan kepada PPID UPT yang kooperatif. Penghargaan ini diberikan kepada PPID UPT yang secara konsisten telah menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

PPID UPT  
PALING KOOPERATIF  
TAHUN 2015

DISNAV SEMARANG



Kriteria penilaian PPID UPT dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2015 adalah :

- Terbentuknya PPID UPT berdasarkan surat Keputusan atasan PPID UPT;
- Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi berdasarkan Peraturan Menteri PM 72 Tahun 2010;
- Menyampaikan laporan pelayanan informasi secara berkala kepada PPID Utama; dan
- Memiliki dukungan sarana dan prasarana kegiatan pelayanan informasi sebagai penunjang.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari keterbukaan informasi publik itu sendiri. Melalui pemberian penghargaan seperti ini diharapkan lebih memacu kinerja para PPID di seluruh UPT Kementerian Perhubungan menjadi lebih baik dan kooperatif dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat terkait transportasi.

Dalam rangka memenuhi persyaratan kelengkapan informasi yang harus dimiliki, Kantor Distrik Navigasi Semarang telah membuat Buku Pintar tahun 2015 yang berisi tentang informasi terkait potensi wilayah kerja dan kondisi teknis, (Kondisi Geografi), Struktur Organisasi, Daftar Nama Pejabat Unit Kerja, Kondisi Alur (Panjang, lebar dan Kedalaman), Kondisi Sarana dan Prasarana (jenis dan jumlah), Kondisi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (Jumlah, Kepangkatan dan profesi keahlian) dan DIPA 2015. Selain itu, Kantor Distrik Navigasi Semarang juga telah memiliki Ruang Pelayanan PPID yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk datang dan mencari informasi yang dibutuhkan. Serta merupakan PPID UPT yang secara inisiatif mengirimkan Laporan Bulanan Pelayanan Informasi secara berkala.

# TANTANGAN TAHUN 2016



## Portal Kementerian yang User Friendly

Untuk memudahkan Pelaksanaan Pelayanan Informasi kami berusaha meningkatkan pelayanan melalui website Kemehub yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.



## Kenaikan Peringkat KIP Kategori Kementerian

Pencapaian Kenaikan Peringkat dalam Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016

# KONTAK KAMI



desk information  
Lobby Gd. Cipta Lantai 1  
Kementerian Perhubungan



Contact Center 151



<http://ppid.dephub.go.id>



[ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)